

MEMPERTIMBANGKAN ETIKA: PERAN KOMUNIKASI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DALAM HUBUNGAN GLOBAL

Aiko Hanna Karmelita¹, Bening Larasati², Margaretta Dian³, Mohammad Sulthan Rafi

Mufti⁴, Puspita Retno Anggraeni⁵, Regina Fortune Mahesi Gandhi⁶

22110260481@lspr.edu¹, 22110260194@lspr.edu², 22110260386@lspr.edu³,

22110260034@lspr.edu⁴, 22110260261@lspr.edu⁵, 22110260341@lspr.edu⁶

LSPR Communication & Business Institute

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan etika, khususnya mengenai peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik moral dalam hubungan global. Maka dari itu, tulisan ini menjawab pertanyaan mengenai peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik moral dalam hubungan global. Hal ini meliputi penggunaan berbagai teknik-teknik komunikasi, seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kultural, dan komunikasi etis. Selain itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah menjelajahi bagaimana pemahaman mengenai etika global yang dapat mempengaruhi dan memperdalam hubungan antar negara. Adapun penelitian ini berfokus kepada keberadaan tiga teori penting dalam menjalin hubungan global. Penelitian ini menemukan bahwa ketiga teori yang relevan tersebut terpenuhi dan menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah konflik dalam ranah internasional. Temuan utama menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman dan penerapan teori-teori ini dapat memperluas manfaatnya dalam mencapai stabilitas dan kerjasama global yang lebih baik. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya pengembangan lebih lanjut terhadap ketiga teori tersebut guna mendukung tujuan penyelesaian konflik moral secara efektif di dunia global saat ini.

Kata Kunci: Etika, Peran Komunikasi, Moral, Hubungan global.

ABSTRACT

This research focuses on ethical considerations, especially regarding the role of communication in resolving moral conflicts in global relations. Therefore, this paper answers the question regarding the role of communication in resolving moral conflicts in global relations. This includes the use of various communication techniques, such as interpersonal communication, cultural communication, and ethical communication. In addition, the main aim of this research is to explore how understanding global ethics can influence and deepen relations between countries. Therefore, this research focuses on the existence of three important theories in establishing global relations. This research finds that the third relevant theory is fulfilled and is the key to success in preventing conflict in the international realm. Key findings suggest that increased understanding and application of these theories can expand their benefits in achieving greater global stability and cooperation. Therefore, this research emphasizes the need for further development of this third theory to support the goal of resolving moral conflicts effectively in today's global world.

Keywords: Ethics, Role of Communication, Morals, Global Relations

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, interaksi antarbudaya dan hubungan internasional menjadi suatu hal yang semakin kompleks. Di tengah dinamika ini, persoalan moral sering kali menjadi salah satu sumber konflik yang mendalam, seperti munculnya pertanyaan mengenai bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan nilai dan pandangan antar negara dan budaya. Hal ini dikarenakan setiap negara mempunyai budaya, nilai, dan tradisinya masing-masing. Konflik moral yang timbul pastinya dapat mempengaruhi kerjasama internasional. Dalam konteks ini, peran komunikasi dalam menavigasi dan menyelesaikan konflik moral menjadi sangat penting sehingga bisa tercapai kesepakatan dan persetujuan yang baik.

Topik yang dibahas ini sangat penting dalam konteks hubungan internasional. Hal ini dikarenakan dapat membantu dalam memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan antar negara. Di sisi lain, pemahaman yang baik mengenai etika global dapat membantu hubungan antar negara menjadi lebih kuat, mengurangi kecurigaan, dan konflik. Dengan demikian, konflik moral tidak hanya mempengaruhi keberlangsungan hubungan diplomatik antara negara-negara, tetapi juga mempengaruhi keamanan global, perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional di berbagai bidang. Oleh karena itu, upaya untuk memahami dan mengatasi konflik moral dengan pendekatan komunikatif dan etis sangatlah relevan dan mendesak. Dengan mengkaji peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik moral dalam hubungan global, diharapkan pemahaman mengenai etika global dalam mempengaruhi hubungan antar negara dapat lebih dipahami secara jelas.

Pada topik kali akan dikenalkan dua teori, yaitu:

(a) Teori Deontologi

Di dalam Teori Deontologi ditekankan bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan aturan moral serta kewajiban yang universal. Tetapi dalam konteks komunikasi secara global, pendekatan dalam Deontologis menuntut para pelaku untuk selalu berbicara dengan jujur, menghormati hak asasi manusia, serta dapat bertindak dengan prinsip-prinsip moral yang harus konsisten, terlepas dari apapun konsekuensinya. Salah satu contohnya yaitu dalam menyelesaikan konflik moral, karena komunikasi juga harus selalu mengedepankan transparansi dan integritas. Setiap negara-negara dan organisasi-organisasi internasional harus dapat berkomunikasi dengan jujur dan transparan dalam semua perjanjian serta negosiasi, dan mematuhi hukum internasional tanpa memandang konsekuensi jangka pendek yang mungkin akan tidak menguntungkan.

Dalam implementasi dari teori Deontologi secara hubungan global melibatkan tindakan yang berdasarkan pada aturan universal serta kewajiban moral. Kejujuran dan transparansi merupakan kunci utama dalam negosiasi dan perjanjian internasional. Mematuhi hukum internasional dan perjanjian yang telah disepakati adalah keharusan, meskipun ada konsekuensi jangka pendek yang mungkin tidak menguntungkan.

(b) Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme mengukur kebaikan tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut memaksimalkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan bagi jumlah orang terbanyak. Dalam menciptakan hubungan global, pendekatan utilitarianisme mungkin mendorong kompromi dan negosiasi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang paling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik. Negara-negara dan organisasi internasional harus berkomunikasi dengan jujur dan transparan dalam semua negosiasi dan perjanjian, serta memastikan kebijakan publik global yang mengutamakan kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.

Implementasi teori utilitarianisme dalam hubungan global mendorong negara-negara dan organisasi internasional untuk mengedepankan negosiasi demi keuntungan bersama dan kebijakan publik yang memaksimalkan kesejahteraan.

Untuk menyelesaikan konflik moral dalam hubungan global, kombinasi dari kedua teori tersebut dapat digunakan. Pertama, menggunakan pendekatan deontologis untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia dan transparansi. Kedua, membangun karakter dan kepercayaan dengan mengedepankan kejujuran dan integritas. Ketiga, menilai dampak potensial dari berbagai tindakan menggunakan analisis utilitarianisme untuk mencari solusi yang meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kesejahteraan. Terakhir, memastikan bahwa hasil akhir distribusi manfaat dan beban adalah adil bagi semua pihak.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data melalui analisis literatur melibatkan beberapa langkah. Pertama, identifikasi sumber yang relevan dilakukan dengan mencari literatur akademik di database seperti Google Scholar, JSTOR, dan perpustakaan digital universitas, dengan fokus pada etika, komunikasi, dan konflik moral dalam konteks global. Kedua, seleksi sumber dilakukan dengan menyaring literatur berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan tanggal publikasi, dengan prioritas pada penelitian terbaru dan artikel dari jurnal terkemuka. Terakhir, pengumpulan sumber mencakup mengumpulkan artikel, buku, dan laporan yang relevan untuk analisis lebih lanjut.

Studi Kasus

Pemilihan kasus melibatkan memilih dua atau tiga kasus yang relevan dan signifikan yang menunjukkan konflik moral dalam hubungan global serta peran komunikasi dalam penyelesaiannya. Kasus-kasus ini dapat berasal dari hubungan diplomatik, organisasi internasional, atau perusahaan multinasional. Pengumpulan data kasus mencakup mengumpulkan data dari sumber primer, seperti wawancara dengan tokoh kunci yang terlibat, dan sumber sekunder, seperti laporan media, dokumen resmi, dan studi sebelumnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data mencakup analisis literatur dan studi kasus. Dalam analisis literatur, konten diidentifikasi untuk menemukan tema utama, konsep, dan argumen terkait peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik moral, serta dilakukan sintesis tematik untuk menggabungkan temuan dari berbagai sumber menjadi kerangka pemahaman yang komprehensif. Pada studi kasus, setiap kasus dijelaskan secara mendetail mencakup latar belakang, aktor utama, isu moral, dan konteks globalnya. Analisis kasus dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mengevaluasi penggunaan komunikasi dalam mengatasi konflik moral dan mengidentifikasi pola serta strategi komunikasi yang efektif. Temuan dari berbagai kasus kemudian dibandingkan untuk menentukan praktik terbaik dan pelajaran yang dapat diambil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi efektif sangat penting untuk menyelesaikan konflik moral dalam hubungan internasional. Kemampuannya untuk memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk memahami perspektif yang berbeda merupakan komponen penting. Mereka dapat mencapai solusi yang menguntungkan keduanya jika mereka saling memahami. Komunikasi yang baik juga mendorong diskusi dan diplomasi yang konstruktif, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk berbicara secara terbuka dan mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, komunikasi yang efektif membantu mengatasi prasangka dan miskomunikasi, yang menghasilkan hubungan yang lebih baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. Terakhir, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan dan nilai masing-masing melalui komunikasi terus-menerus.

Selama bertahun-tahun, empat pendekatan dominan telah digunakan dalam praktik komunikasi global: pendekatan idealistik humanistik, kepengikutan politik baru (prosedulasi politik), informasi sebagai kekuatan ekonomi dan politik. Komunikasi global idealnya ditujukan untuk saling pengertian, saling mendukung, dan kerjasama antarwarga negara dan antarmanusia. Karena mereka memiliki kecukupan sumber daya untuk berbagi

atau berkontribusi dalam banyak hal, pihak yang lebih mampu kadang-kadang menganggap tujuan ini mengandung kerugian. Negara-negara maju yang memiliki kepentingan politik juga sering menggunakan komunikasi global untuk memenuhi kepentingan nasional dan memperluas wilayah pengaruh politiknya. Dalam situasi seperti ini, komunikasi global digunakan untuk memperkuat dominasi suatu negara atas negara lain atau wilayah tertentu. Tujuan ini jelas membutuhkan biaya yang sangat besar. Suatu negara cenderung mengambil berbagai tindakan untuk mempertahankan atau memperluas wilayah pengaruh itu, termasuk politik pengekanan.

Komunikasi global lebih banyak dilakukan melalui media diplomatik untuk meningkatkan pengaruh, meningkatkan komitmen dan solidaritas, mengatasi perbedaan pendapat dan salah paham, dan mencegah konflik tentang tujuan dan kepentingan suatu negara. Komunikasi internasional sering digunakan untuk mencegah konflik, mendorong kerja sama dalam hubungan bilateral dan multilateral, memperkuat posisi tawar (*bargaining position*), dan meningkatkan reputasi dan citra suatu negara. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi diplomatik dan tradisi diplomatik di antara negara berdaulat untuk membangun perdamaian dan kemajuan internasional. Perspektif diplomatik komunikasi internasional mencakup banyak kunjungan ke negara dan partisipasi dalam konferensi internasional. Contoh konkretnya termasuk komunikasi antara pejabat tinggi negara dengan negara lain melalui forum tukar pikiran, persidangan, perundingan, dan cara lain untuk mendorong resolusi PBB. Contoh lainnya adalah kontak untuk memberikan informasi tentang keadaan aktual mengenai stabilitas sosial politik, yang meningkatkan kerja sama internasional, dan mendorong masuknya internasional.

Salah satu tujuan dari komunikasi global adalah untuk menciptakan suasana yang damai dalam hubungan yang penuh dengan konflik politik, ekonomi, militer, sosial, dan budaya. Ini semua dapat dicapai hanya jika para diplomat benar-benar berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan kesepahaman tentang berbagai masalah internasional. Sebenarnya, kesempatan selalu ada dan alat komunikasi selalu ada untuk digunakan untuk menyampaikan pesan, kehendak, harapan, atau bahkan ancaman. Karena ada konflik kepentingan antara satu negara dengan negara lain, komunikasi global menjadi semakin penting untuk mengatasi perbedaan, mencegah konflik, menjembatani kepentingan, dan mengukuhkan hubungan internasional. Indonesia memiliki peran penting dalam pergaulan internasional karena sistem politik, hukum, militer, ekonomi, dan sosial budayanya yang kuat.

Prinsip moral dan etika komunikasi sangat penting untuk hubungan internasional. Mereka memengaruhi cara negara berkomunikasi, berinteraksi, dan menangani konflik, serta membentuk dasar untuk interaksi antara negara dan aktor internasional lainnya. Penghormatan terhadap hak asasi manusia didorong oleh prinsip moral dan etika komunikasi dalam hubungan internasional. Ini mencakup hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, dan hak untuk perlakuan yang adil bagi setiap orang. Diharapkan bahwa negara-negara dan pihak yang berpartisipasi dalam hubungan internasional berkomunikasi dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini dalam segala aspek diplomasi dan hubungan internasional. Etika komunikasi juga mencakup menghentikan konflik dan menyelesaikannya melalui diplomasi perdamaian. Dalam menangani ketegangan internasional, negara-negara diharapkan untuk mengutamakan dialog, mediasi, dan negosiasi daripada menggunakan kekuatan militer atau ancaman kekerasan. Selain itu, prinsip moral dan etika komunikasi mempertimbangkan tanggung jawab terhadap lingkungan global. Negara-negara diharapkan berkomunikasi dan bekerja sama untuk melindungi lingkungan, mengurangi efek perubahan iklim, dan mempertahankan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Sub-Pembahasan

1. Kepresidenan COP29 dan Mitra #Together4Transparency untuk Membangun Keyakinan dalam Pelaporan Perubahan Iklim

Presidensi yang akan datang dari Konferensi Perubahan Iklim PBB COP29 di Baku, Azerbaijan, akan bekerja sama dengan inisiatif #Together4Transparency Perubahan Iklim PBB untuk menunjukkan betapa pentingnya pelaporan iklim untuk memungkinkan negara-negara memenuhi komitmen mereka terhadap Perjanjian Paris dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan mereka sendiri.

Kepresidenan COP29, bekerja sama dengan Perubahan Iklim PBB dan UNDP, mengadakan lokakarya dua hari di Baku, Azerbaijan, pada tanggal 13–14 Mei 2024. Tujuan lokakarya ini adalah untuk meningkatkan kapasitas para ahli dan meningkatkan kepercayaan diri dalam persiapan dan penyerahan Laporan Transparansi Dua Tahunan yang baru (BTR). Untuk memastikan bahwa semua negara dapat menyerahkan BTR mereka tepat waktu, kepresidenan COP29 mengoordinasikan berbagai bentuk dukungan untuk memastikan bahwa semua negara dapat berpartisipasi.

Semua negara harus mengajukan BTR baru pada tanggal 31 Desember 2024. Ini akan menjadi tonggak sejarah Perjanjian Paris karena akan menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam komitmen iklim mereka. Negara-negara harus memberi tahu dunia tentang upaya mereka untuk mengurangi emisi, menerapkan kebijakan iklim, dan memastikan bahwa pendanaan iklim tersedia jika diperlukan.

Lokakarya ini, yang diadakan dalam format gabungan untuk meningkatkan aksesibilitas, menawarkan platform bagi negara-negara untuk berkumpul dan berbagi pengalaman dan pembelajaran, khususnya tentang bagaimana kualitas dan isi laporan telah berkembang dan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri negara-negara tersebut.

"Sebagai Presiden COP yang akan datang, kami tahu betapa pentingnya transparansi iklim bagi Perjanjian Paris: hal ini memungkinkan kami melacak kemajuan menuju tujuan bersama, membangun kepercayaan dan keyakinan, membuka peluang pendanaan, dan mengidentifikasi bidang-bidang di mana kita perlu mempercepat tindakan," kata Yalchin Rafiyev, Kepala Negosiator Presidensi COP29.

Beliau juga mengatakan, "Lokakarya hari ini merupakan kegiatan besar pertama yang menyatukan beberapa kelompok pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk bekerja sama dalam persiapan framework transparansi yang ditingkatkan (ETF), khususnya pengajuan BTR tahun ini, mengakui bahwa semua aktor dapat berperan dalam memastikan keberhasilan Perjanjian Paris." Dengan kesempatan ini, saya ingin meminta semua pihak untuk membuat dan mengirimkan BTR pertama mereka sebelum COP29. Selain itu, kami ingin meminta organisasi internasional yang diberi mandat untuk memberikan dukungan teknis kepada Para Pihak dalam untuk mempercepat proses, yang mencakup persiapan BTR. BTR sangat penting untuk mengawasi kemajuan tindakan iklim dan menilai apakah kita berada di jalur yang tepat untuk menghentikan pemanasan global. Hal ini pada gilirannya mendorong ambisi yang lebih kuat dalam komitmen masa depan negara-negara yang dibentuk oleh Perjanjian Paris.

Negara-negara dapat menggunakan data BTR untuk membuat pilihan iklim yang jelas, melaksanakan rencana iklim yang ambisius, menarik dukungan untuk tindakan iklim tambahan, dan menginformasikan rencana kontribusi nasional selanjutnya (NDC). Pada bulan April, serangkaian lokakarya online regional diadakan di Baku sebagai bagian dari upaya PBB untuk meningkatkan kapasitas BTR, dengan fokus pada dukungan yang tersedia bagi negara-negara untuk persiapan dan penyerahan BTR. Hampir 400 pakar transparansi dari 111 negara, serta 14 organisasi pemberi dukungan, bertukar pengetahuan

dan praktik terbaik. Akan ada peluang lebih lanjut bagi negara untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam beberapa bulan ke depan. Salah satunya adalah lokakarya tatap muka yang direncanakan pada bulan Juni 2024 di Bonn, di Konferensi Iklim PBB (SB 60).

Gambar 1. Sidang COP29 di Baku, Azerbaijan



2. Krisis Rohingya dan Tanggapan Internasional

Krisis Rohingya di Myanmar telah memicu krisis kemanusiaan dengan ribuan orang mengungsi akibat kekerasan etnis. Komunitas internasional menghadapi dilema moral dalam merespons situasi ini. Aktor Utama dalam kejadian ini adalah Pemerintah Myanmar, negara-negara tetangga (seperti Bangladesh), organisasi internasional (PBB, UNHCR), dan LSM hak asasi manusia. Dalam kasus ini, terdapat isu moral berupa hak asasi manusia, genosida, dan tanggung jawab internasional. Dengan demikian, peran komunikasi yang dilakukan melalui media internasional dan organisasi hak asasi manusia memainkan peran penting dalam membawa perhatian global pada krisis ini. Komunikasi diplomatik antara negara-negara dan organisasi internasional berusaha mencari solusi kemanusiaan dan politik.

Gambar 2. Situasi Krisis Rohingya di Myanmar



KESIMPULAN

Mengingat pentingnya komunikasi dalam penyelesaian konflik moral dalam hubungan global, serta berdasarkan teori dan metodologi yang telah dibahas, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut untuk melaksanakannya:

1. Pendekatan Deontologis dalam Komunikasi Diplomatik

- Prinsip Kejujuran dan Transparansi: Semua Negara dan Organisasi Internasional harus mempraktikkan komunikasi yang jujur dan transparan dalam negosiasi dan perjanjian mereka. Misalnya, proses diplomasi seperti negosiasi perdagangan atau perjanjian iklim mengharuskan diplomat untuk memastikan bahwa semua informasi relevan dikomunikasikan secara lengkap dan akurat.

- Kepatuhan terhadap hukum internasional: Negara-negara harus mematuhi hukum internasional dan perjanjian-perjanjian yang disepakati, terlepas dari konsekuensi jangka pendek yang mungkin merugikan. Contohnya termasuk kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan perjanjian lingkungan hidup.
2. Pendekatan Utilitarianisme terhadap kebijakan publik
 - Perundingan untuk kesejahteraan bersama: Ketika menyelesaikan konflik moral, negara harus fokus pada negosiasi yang tidak memaksimalkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Salah satu contohnya adalah perjanjian internasional untuk mengurangi emisi karbon, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak perubahan iklim terhadap populasi dunia.
 - Kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan: Pemerintah dan organisasi internasional harus mengembangkan kebijakan publik yang memprioritaskan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Misalnya, kebijakan bantuan kemanusiaan didasarkan pada analisis utilitarian untuk memastikan distribusi yang adil dan efisien.
 3. Metodologi Komunikasi
 - Analisis Wacana: Analisis wacana diplomasi untuk memahami bagaimana bahasa dan komunikasi digunakan untuk membentuk persepsi moral. Misalnya, periksa pidato PBB dan pernyataan resmi negara-negara di konferensi internasional.
 - Dialog Antarbudaya: Mempromosikan dialog antarbudaya melalui komunikasi dan mediasi antarbudaya. Salah satu contohnya adalah mengadakan lokakarya dan konferensi yang melibatkan berbagai budaya untuk membahas isu-isu moral seperti hak asasi manusia dan kebijakan lingkungan.
 - Komunikasi Tanpa Kekerasan (GVK): Konsultasi multilateral, seperti konferensi internasional yang membahas pelanggaran hak asasi manusia, menggunakan pendekatan NVC untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan.
 4. Penggunaan teknologi komunikasi digital
 - Diplomasi digital: Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan diplomasi dan dialog antar negara. Misalnya, gunakan Twitter dan forum online internasional untuk mendorong diskusi mengenai isu-isu moral yang mendesak seperti krisis kemanusiaan.
 - Dialog Virtual: Melaksanakan Dialog Virtual untuk memungkinkan partisipasi berbiaya rendah dan akses luas dari berbagai belahan dunia.
 5. Contoh nyata:
 - Krisis Rohingya: Peran media dan organisasi hak asasi manusia: Organisasi internasional Memanfaatkan media dan organisasi hak asasi manusia. Sebuah organisasi yang mencari solusi kemanusiaan dan politik.

Di era globalisasi yang semakin terintegrasi, konflik moral kerap muncul akibat perbedaan nilai, kepentingan, dan gagasan antar negara, kelompok, dan individu. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan ini dengan:

 1. Memahami perspektif yang berbeda: Melalui komunikasi yang efektif, pihak-pihak yang terlibat konflik dapat memahami perspektif, nilai, dan kepentingan satu sama lain, sehingga memungkinkan adanya solusi.
 2. Mendorong dialog dan diplomasi: Komunikasi yang baik memungkinkan dialog terbuka dan diplomasi konstruktif, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencarian solusi yang adil dan berkelanjutan.
 3. Mengatasi Kesalahpahaman dan Prasangka: Komunikasi yang efektif membantu

mengatasi prasangka dan kesalahpahaman yang seringkali menjadi akar penyebab konflik, sehingga membangun hubungan yang lebih baik.

4. Membangun Kepercayaan dan Kolaborasi: Komunikasi yang terbuka dan jujur membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang berselisih dan memungkinkan mereka bekerja sama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.
5. Terbentuknya Kesepakatan Bersama : Melalui komunikasi yang berkesinambungan, pihak-pihak yang berkonflik dapat mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak, termasuk kompromi yang memperhatikan kepentingan dan nilai masing-masing pihak.

Oleh karena itu, penelitian ini mendukung pentingnya peran komunikasi dalam menyelesaikan konflik moral dalam hubungan dunia. Menggunakan pendekatan berdasarkan etika deontologis dan utilitarianisme, serta metode komunikasi yang efektif, dapat membantu membangun hubungan internasional yang lebih kuat, mengurangi konflik, dan meningkatkan keamanan dan kerja sama global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International. (2017). Myanmar: Crimes against Humanity Terrorize and Drive Rohingya Out.
- Avruch, K. (1998). Culture and conflict resolution. United States Institute of Peace Press.
- Direktorat Jenderal Hukum Dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri. (2009). Diambil kembali dari <https://perpustakaan.kemlu.go.id/>: https://perpustakaan.kemlu.go.id/index.php?p=show_detail&id=1215&keywords=#:~:text=Konvensi%20WINA%201961%20menetapkan%20prinsip,cara%20pengangkatan%20dan%20penarikan%20diplomat.
- Fisher, R., Ury, W., & Patton, B. (2011). Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In. Penguin Books.
- Gischa, S. (2020, December 3). Krisis Rohingya di Myanmar. KOMPAS.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/03/130323969/krisis-rohingya-di-myanmar>
- Kriesberg, L. (2003). Constructive conflicts: From escalation to resolution. Rowman & Littlefield.
- Permana, R. (2015). Komunikasi Internasional Oleh Pemerintah Indonesia Sebagai Official Transaction Dalam Menghadapi ASEAN Community 2015 (Ditinjau Dari Perspektif Diplomasi). *Comicos 2014 Bridging The Cap*, 1 - 11.
- Putnam, L. L., & Roloff, M. E. (Eds.). (2019). Communication and negotiation. Routledge.
- Sianturi, H. M. (2013). Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yuridiksi Antara Jerman Dan Italia Terkait Nazi. 1 - 21.
- United Nations Climate Change. (2024, Mei 13). Diambil kembali dari <https://unfccc.int/>: <https://unfccc.int/news/cop29-presidency-and-together4transparency-partner-to-build-confidence-for-climate-reporting>
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (2018). Rohingya Emergency.